



Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi

Volume 13 Nomor 2 Tahun 2023 : 139 - 148

<http://ejournal.unis.ac.id/index.php/JIJA>

DOI: 10.33592/jiia.v13i2.4282

p-ISSN p-2477-5088

e-ISSN e-2716-2621

Efektivitas Aplikasi Sippol Dalam Peningkatan Kinerja Sub Bagian Rumah Tangga Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
The Effectiveness Of The Sippol Application In Improving The Performance Of The Household Subdivision Of The General Bureau Of The Regional Secretariat Of East Java Province

¹Nofiro Bening Dwi Wangkasa; ²Rosyidatuzzahro Anisykurlillah

¹Administrasi Publik/Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia

²Administrasi Publik/Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia

Email: nbening16@gmail.com, rosyida.adne@upnjatim.ac.id

(Diterima: 08-Desember-2023; Ditelaah: 15-Desember-2023; Disetujui: 22-Desember-2023)

ABSTRAK (ABSTRACT)

Pada zaman modern ini digitalisasi perkembangan akan teknologi dan informasi semakin cepat dan berkembang. Salah satu perkembangan zaman digitalisasi yakni menciptakan sebuah inovasi program aplikasi untuk mempermudah kinerja kelompok organisasi tersebut dalam menyelesaikan tugasnya. Salah satu perkembangan tersebut adalah program aplikasi SIPPOL atau Sistem Informasi Penatausahaan Perbendaharaan Online. Tujuan adanya aplikasi SIPPOL ini mempermudah dan mempercepat kinerja pegawai sub bagian rumah tangga dalam penginputan data untuk pelaporan hasil keuangan yang dilakukan oleh pejabat daerah di Provinsi Jawa Timur dalam setiap bulannya. Tujuan penelitian ini yakni untuk menganalisis efektivitas program aplikasi Sistem Informasi Penatausahaan dan Perbendaharaan Online (SIPPOL) dalam peningkatan Kinerja Sub Bagian Rumah Tangga Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi. Penelitian ini mengacu pada teori efektivitas yang terdiri dari empat indikator yakni ketepatan sasaran, sosialisasi, pencapaian tujuan, serta pemantauan program. Hasil penelitian menunjukkan dari keempat indikator efektivitas menyatakan tiga dari empat tersebut efektif, walaupun satu indikator kurang efektif. Hal ini sudah dapat membuktikan bahwa, benar dengan adanya program aplikasi SIPPOL milik BKAD Provinsi Jawa Timur berdampak efektif dalam meningkatkan kinerja pegawai Sub Bagian Rumah Tangga Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.

Kata kunci : Administrasi Pemerintah, Efektivitas, Inovasi Pelayanan, SIPPOL

A. PENDAHULUAN (INTRODUCTION)

Berkembangnya era globalisasi menuntut setiap organisasi baik publik atau perusahaan swasta menciptakan efisiensi dan upaya staf yang tinggi inovasi untuk memberikan hasil maksimal pada organisasi atau perusahaan tersebut. Teknologi informasi semakin berkembang menjadi lebih cepat dan lebih kompleks, sehingga mengharuskan orang untuk mengikutinya dengan kemampuan yang ada pada diri orang itu sendiri. Hal ini juga menjadikan kinerja dari pegawai tersebut lebih cepat, mudah dan ringan karena terbantu dengan teknologi yang semakin canggih tersebut. Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri memperkenalkan E-Government untuk memfasilitasi sistem pemerintah pusat dan memantau perkembangan antar lembaga pemerintah.

Di Indonesia dalam melaksanakan aktivitas pemerintah berpatokan pada prinsip pemerintahan yang baik terdiri dari 4 prinsip yaitu transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan koordinasi. Prinsip-prinsip tersebut merupakan kewajiban yang tidak hanya berlaku di pusat, namun juga di daerah. Di Jawa Timur sesuai dengan program Gubernur Khofifah yang bernama Nawa Bhakti Satya atau sembilan program kerja selama satu periode salah satunya Bhakti ke - 8 yaitu, Jatim Amanah. Dimana bhakti tersebut bermakna bahwa Gubernur Khofifah berkomitmen sesuai dengan visi dan misinya untuk menyelenggarakan Pemerintah Jawa Timur yang bersih, efektif, transparansi, dan anti-korupsi. Dengan hal tersebut dapat diketahui bahwa nilai efektif sangat dibutuhkan dan penting dalam menjalankan pemerintah yang baik, karena jika pemerintah tidak menerapkan nilai efektif maka akan mempengaruhi kualitas kinerja dan menjadi peluang terjadinya maladministrasi.

Sistem Informasi Penatausahaan dan Perbendaharaan Online atau SIPPOL adalah program aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah untuk meningkatkan efektifitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan pemerintah (Sutabri, 2012). Sistem informasi Penatausahaan dan Perbendaharaan (SIPPOL) merupakan aplikasi milik Badan Pengelolaan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur yang berbasis online, efisien dan mandiri namun tetap diawasi oleh pusat yang mempermudah untuk mengakses data informasi yang dimana faktor keakuratan, kelengkapan dan validasi data menjadi unsur yang penting dalam proses pengumpulan dan penginputan data. Dapat dikatakan bahwa program aplikasi Sistem Informasi Penatausahaan dan Perbendaharaan Online (SIPPOL) memiliki tujuan mempermudah kinerja pegawai dan tidak bekerja sampai diluar jam kerja untuk menyelesaikan laporan manajemen keuangan pada setiap bulannya.

Pengertian manajemen keuangan yang lebih luas adalah upaya manajemen yang mencakup semua fungsi mencapai tujuan ekonomi perusahaan atau organisasi (Ibrahim, 2006). Sekaligus dalam arti sempit, pengelolaan keuangan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pencatatan pendapatan dan pengeluaran pembiayaan yang berbeda, kegiatan organisasi yang merupakan bentuk tata kelola atau akuntansi keuangan (Ibrahim, 2006). Melihat ini selama proses administrasi lembaga publik dan swasta, tentu saja manajemen keuangan adalah bagian suatu hal penting yang harus berjalan efektif dan

Nofiro Bening Dwi Wangkasa, Rosyidatuzzahro Anisykurlillah (2023). Efektivitas Aplikasi Sippol Dalam Peningkatan Kinerja Sub Bagian Rumah Tangga Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur

efisien. Agar pengelolaan keuangan berjalan lancar memerlukan pelaporan yang kompeten dan terintegrasi dengan baik. Menurut Gullic dalam (Siagina, 2003) pelaporan adalah salah satu tugas manajemen yang berupa mengkomunikasikan kemajuan, evaluasi atau memberitahukan kepada pejabat yang lebih tinggi tentang segala tugas dan permasalahan yang berkaitan dengan tugas, sehingga setelah menerima laporan mempunyai gambaran bagaimana orang yang menugaskan akan menyelesaikan tugas tersebut.

Dapat diketahui, dalam penginputan data pada aplikasi Sistem Informasi Penatausahaan dan Perbendaharaan Online (SIPPOL) membutuhkan keakuratan dan kecepatan dalam menyelesaikannya karena berhubungan dengan pertanggung jawaban dana yang dikeluarkan. Proses pengelolaan keuangan daerah dimulai dari perencanaan, pemeriksaan, pelaksanaan, dan pengelolaan rekening bendahara. Biaya berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan karena dapat memudahkan pembuatan laporan pelaporan yang saling terkait. Bendahara melakukan pembukuan dengan mencatat transaksi keuangan yang kemudian dipertanggungjawabkan. Namun pelaksanaan program ini cukup sulit karena dibutuhkan kerjasama atau saling mendukung dari setiap instansi yang terlibat. Setiap akhir bulan diadakan penginputan data untuk pelaporan hasil keuangan oleh pejabat daerah di seluruh Provinsi Jawa Timur.

Penginputan data pada aplikasi SIPPOL ini dilakukan setiap kali adanya proses pembayaran atau Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas (SPPD) yang masuk dan sudah terproses oleh verifikator keuangan. Terdapat beberapa sumber dana yang diinput melalui aplikasi SIPPOL di antara lain yaitu SPJ, SPPD, ganti uang (GU), langsung (LS) yang hanya dibayarkan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah (BPKAD). Minimal penginputan sumber dana dalam seminggu sekali apabila semua sumber dana tersebut telah di spj kan sudah lengkap semua aspeknya kemudian di input melalui aplikasi SIPPOL. Dalam penginputan data pada laman aplikasi SIPPOL terdiri dari 3 sumber berkas yaitu, SPJ dan SPPD pencairan dana yang berasal dari Kantor Gubernur, Wakil Gubernur, dan Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur. Dimana, penginputan berkas menggunakan aplikasi SIPPOL dilakukan oleh Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur hanya pada bagian Biro Umum karena anggaran pada bagian Biro Umum sangat banyak.

Namun, dengan berjalannya waktu aplikasi Sistem Informasi Penatausahaan dan Perbendaharaan Online (SIPPOL) akan digantikan oleh program aplikasi baru bernama Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) milik Kemendagri yang dianggap lebih efektif dan efisien dibandingkan aplikasi SIPPOL. Tetapi, dalam pelaksanaannya saat ini aplikasi SIPPOL masih tetap digunakan. Karena sangat membantu kinerja pegawai Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Bagian Biro Umum dengan banyaknya berkas khususnya di Sub. Bagian Rumah Tangga yang memudahkan dalam pengawasan dan evaluasi berkas SPJ (surat pertanggung jawaban). Maka dari itu, aplikasi SIPPOL diharapkan tetap dapat membantu mengefektifkan kinerja para pegawai. Evaluasi dengan efektivitas pelaksanaan dilaksanakan untuk mengetahui keberhasilan program. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas aplikasi SIPPOL dalam Peningkatan Kinerja Kantor Sekretariat Provinsi Jawa Timur bagian Biro Umum Sub. Bagian Rumah Tangga dengan menggunakan empat indikator yaitu: pertama, ketepatan

sasaran artinya objek yang dituju harus sesuai dengan ketentuan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya agar program yang dibuat dapat terlaksana dengan efektif; kedua, sosialisasi artinya mengenalkan sesuatu program atau masalah yang menjadi bahan utama kepada objek untuk memudahkan objek mengimplementasikan tujuan agar sesuai aturannya; ketiga, tujuan program artinya target yang ingin dicapai oleh suatu organisasi di waktu yang akan datang, dan yang terakhir pemantauan program artinya memonitoring atau evaluasi suatu program untuk membandingkan hasil yang dicapai dan memperbaiki program jika terdapat kekurangan agar hasil yang dicapai sesuai tujuan. Dimana keempat indikator ini sesuai dengan teori pengukuran efektivitas menurut Budiani (2007) dalam (Farhani & Adnan, 2021).

B. METODE (METHOD)

Penelitian ini memakai metode deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif memberikan informasi yang sesuai dengan fakta peristiwa seperti yang dialami informan. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Model interaktif oleh (Miles et al., 2014) akan digunakan untuk analisis data dalam penelitian ini. Model ini melibatkan proses mengumpulkan informasi dengan berbagai teknik untuk mendukung pelaksanaan penelitian, lalu dilanjutkan menjumlah data untuk memilih informasi tersebut. Tahap akhir analisis data yaitu, penarikan kesimpulan yang bertujuan untuk mendapatkan substansi dari data yang dikumpulkan. Model analisis data dipilih karena memudahkan dalam pengambilan kesimpulan secara efisien, efektif dan menghasilkan penelitian yang valid dan akurat.

Fokus penelitian ini untuk mengetahui efektivitas aplikasi Sistem Informasi Penatausahaan dan Perbendaharaan Online (SIPPOL) dalam peningkatan kinerja Kantor Sekretariat Provinsi Jawa Timur bagian Biro Umum Sub. Bagian Rumah Tangga dilihat dari indikator ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program dan pemantauan program. Penelitian ini dilakukan di Kantor Sekretariat Provinsi Jawa Timur dengan informan pegawai operator SIPPOL yang menggunakan aplikasi SIPPOL pada Kantor Sekretariat Provinsi Jawa Timur bagian Biro Umum Sub. Bagian Rumah Tangga. Informan ditentukan dengan teknik purposive sampling. Teknik purposive sampling digunakan karena peneliti memilih informan berdasarkan pertimbangan, yaitu informan yang paling menguasai tentang topik penelitian. Pihak tersebut yaitu, Ibu Sri Rahayu selaku penata laporan keuangan dan pegawai operator aplikasi SIPPOL yang bertugas menginput berkas SPJ dan SPPD di Sub Rumah Tangga. Di samping itu, peneliti juga melakukan observasi atau mengamati secara langsung bagaimana kondisi yang terjadi selama penggunaan program aplikasi SIPPOL.

Sumber data menggunakan data primer dan sekunder. Untuk pengumpulan data primer melalui metode penelitian lapangan berupa observasi partisipasi dan wawancara mendalam (Zuchri Abdussamad, 2021). Dimana, observasi dan wawancara dilakukan dengan pegawai operator SIPPOL Kantor Sekretariat Provinsi Jawa Timur bagian Biro Umum Sub. Bagian Rumah Tangga. Namun, disisi lain peneliti juga berupaya memaksimalkan dan melengkapi informasi yang kurang didapatkan selama wawancara ataupun observasi, dengan melakukan penghimpunan data sekunder yang akurat seperti bersumber pada jurnal, buku, artikel berita atau dokumen penting lainnya untuk mendukung topik penelitian ini.

C. HASIL DAN DISKUSI (RESULT AND DISCUSSION)

Hasil (Result)

Nofiro Bening Dwi Wangkasa, Rosyidatuzzahro Anisykurlillah (2023). Efektivitas Aplikasi Sippol Dalam Peningkatan Kinerja Sub Bagian Rumah Tangga Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur

Efektivitas Program Aplikasi Sistem Informasi Penatausahaan dan Perbendaharaan Online (SIPPOL) Dalam Peningkatan Kinerja Kantor Sekretariat Provinsi Jawa Timur Bagian Biro Umum Sub. Bagian Rumah Tangga

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 57 Tahun 2011 Pasal 3, Inspektorat berfungsi sebagai lembaga pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di tingkat Provinsi, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah di tingkat Kabupaten atau Kota, serta pelaksanaan urusan pemerintahan di tingkat Kabupaten atau Kota. Inspektorat dipimpin oleh seorang inspektur yang memiliki tanggung jawab kepada gubernur dan berada di bawah tanggung jawab sekretaris daerah Provinsi Jawa Timur. Dalam melaksanakan tugas yang ditentukan dalam ayat 1 yaitu, melaksanakan tugas untuk menyiapkan instruksi pengendalian teknis, fasilitas pengawasan, melaksanakan fasilitas internal dan pengendalian keuangan melalui audit, evaluasi, pemantauan dan tindakan pengendalian lainnya, dan pengendalian. Salah satu contoh, yaitu untuk keperluan tertentu atas perintah Gubernur atau Menteri. Maka, dengan terciptanya program aplikasi Sistem Informasi Penatausahaan dan Perbendaharaan Online (SIPPOL) bertujuan untuk memberikan kemudahan kinerja pegawai dalam mengakses dan menginput data secara efektif, dan efisien.

Dari beberapa penelitian tentang program aplikasi SIPPOL, terdapat pendapat peneliti lain yang mengungkapkan bahwa aplikasi ini hadir untuk memudahkan dalam pelaporan keuangan. Sebelum adanya SIPPOL, pelaporan keuangan dilakukan secara manual dan dokumen laporan keuangan harus dikirim ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Maka, dengan adanya aplikasi Sistem Informasi Penatausahaan Perbendaharaan Online (SIPPOL), proses pelaporan menjadi lebih efisien. Pengguna hanya perlu mengunggah dokumen laporan keuangan ke dalam sistem, sehingga menghemat waktu dan upaya dalam meningkatkan Kinerja Pengelolaan Keuangan Di Inspektorat Provinsi Jawa Timur. Sistem ini juga diharapkan dapat meningkatkan kinerja pemerintah melalui kerjasama berbasis teknologi sehingga dapat membangun database yang ada di Inspektorat Jawa Timur serta dapat menggambarkan potensi dan sumberdaya yang dimiliki oleh Pemerintah Jawa Timur dalam mendukung pengembangan sistem informasi pengelolaan keuangan yang valid dan akurat.

Meningkatkan kinerja pegawai yang dimaksud yaitu, diharapkan melalui kerjasama berbasis teknologi ini dapat membangun database yang ada di Kantor Sekretariat Provinsi Jawa Timur bagian Biro Umum Sub. Bagian Rumah Tangga sehingga, menciptakan sistem informasi pengelolaan keuangan yang valid dan akurat. Dimana hal ini dapat dilihat melalui keunggulan yang dimiliki aplikasi SIPPOL dibandingkan dengan aplikasi sebelumnya yaitu, Aplikasi Sistem Informasi Penatausahaan dan Perbendaharaan Online (SIPPOL) memudahkan dalam melihat mutasi atau pergerakan transaksi dan realisasi keuangan baik secara harian, mingguan, maupun bulanan. Bendahara maupun pegawai operator SIPPOL dengan mudah melihat dan memantau pergerakan transaksi keuangan serta realisasi keuangan secara berkala. Informasi ini dapat diakses dengan cepat dan mudah, sehingga mempermudah dalam mengambil keputusan terkait keuangan. Aplikasi SIPPOL juga dilengkapi fitur *tracking* (sistem lacak) untuk memantau dan mengetahui tahapan proses pengajuan dana atau penatausahaan perbendaharaan. Dengan

adanya sistem lacak, proses pengajuan lebih cepat dan efisien karena dapat mengetahui posisi pengajuan.

Aplikasi Sistem Informasi Penatausahaan dan Perbendaharaan Online (SIPPOL) juga meminimalisir kesalahan manusia (*human error*) dalam penulisan dan perhitungan karena sistem secara otomatis mengolah data sesuai dengan format yang ditentukan. Dimana, membantu mendeteksi akurasi dan konsistensi laporan keuangan yang dihasilkan. Secara keseluruhan, penggunaan aplikasi SIPPOL dalam penatausahaan perbendaharaan pada Sub Bagian Rumah Tangga diharapkan dapat meningkatkan kinerja pegawai dalam hal efisiensi, terutama dalam hal efisiensi waktu dalam proses pembuatan laporan keuangan.

Efektivitas Aplikasi Sistem Informasi Penatausahaan dan Perbendaharaan Online (SIPPOL) dalam Peningkatan Kinerja Sub Bagian Rumah Tangga diukur menggunakan 4 teori efektivitas, yakni: Ketepatan sasaran, sosialisasi, tujuan dan pemantauan program. Teori ini diimplementasikan karena adanya kecocokan dengan adanya pelaksanaan program Aplikasi SIPPOL Dalam Peningkatan Kinerja Sub Bagian Rumah Tangga. Tujuan diimplementasikannya teori ini yakni untuk mengetahui efektivitas program SIPPOL dalam peningkatan kinerja pegawai Sub Bagian Rumah Tangga.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, selain juga merasakan langsung atau ikut serta dalam mengimplementasikan program SIPPOL ini. Peneliti mendapatkan hasil analisis bahwa keempat indikator efektivitas tersebut. Dimana yang pertama, indikator ketetapan sasaran pada Sub Bagian Rumah Tangga Biro Umum Kantor Sekretariat Daerah Jawa timur sudah berjalan sesuai tujuan atau tepat sasaran, dapat dibuktikan dengan target sasaran program ini yaitu, pegawai operator SIPPOL sudah merasakan hasil dari tujuan dibuatnya program aplikasi SIPPOL yakni, pegawai operator SIPPOL merasakan hasil kinerja mereka lebih banyak namun tetap mudah dilakukan karena tidak lagi membutuhkan waktu yang lama atau lebih fleksibel dan cepat tetapi data yang diinput tetap akurat, valid, efektif, dan efisien. Kedua, indikator sosialisasi program hal ini sama dengan indikator pertama yang mana berjalan sesuai tujuan karena sosialisasi program yang dilakukan oleh pemilik aplikasi SIPPOL yaitu pihak Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah (BPKAD) nyata adanya.

Pendampingan atau sosialisasi dilakukan guna seluruh pegawai operator SIPPOL paham cara penggunaan atau pelaksanaan program aplikasi tersebut. Meskipun, sebagian masih terdapat kendala karena tidak seluruh tata cara pada aplikasi ditunjukkan step by step secara jelas dalam sosialisasi. Ketiga, indikator tujuan program dalam indikator ini Sub Bagian Rumah Tangga Biro Umum Kantor Sekretariat Daerah Jawa timur mendapatkan hasil tepat pada fungsinya karena sesuai tujuan dari dibuatnya program aplikasi SIPPOL ini. Dimana dengan adanya sistem atau program aplikasi SIPPOL kinerja pegawai Sub. Bagian Rumah Tangga khususnya pegawai operator SIPPOL lebih meningkat dalam membantu bendahara melakukan pengawasan, evaluasi, dan penginputan data laporan pertanggung jawaban ataupun laporan surat pertanggung jawaban perjalanan dinas yang telah dilakukan oleh para pegawai Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur. Keempat, indikator pemantauan program.

Indikator ini adalah salah satu indikator yang belum sepenuhnya berjalan sesuai tujuan awal dibentuknya program aplikasi SIPPOL dikarenakan pada indikator ini pihak pemilik aplikasi yaitu, Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah (BPKAD) tidak melakukan evaluasi atau pemantauan berkelanjutan dari pengimplementasian program aplikasi SIPPOL, karena para dari hasil wawancara para pegawai mendapatkan dampak secara langsung dari kurangnya pemantauan program aplikasi SIPPOL. Pegawai operator SIPPOL Sub Bagian Rumah Tangga Biro Umum Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dituntut untuk secara mandiri mencari informasi jika terdapat kekurangan atau kesalahan pada pengimplementasian aplikasi SIPPOL ini tanpa adanya pendampingan berkelanjutan dan perbaikan sistem dari pihak BPKAD.

Diskusi (*Discussion*)

Ketepatan Sasaran Program

Tepat sasaran menurut Sutrisno (2018) dalam teori (Farhani & Adnan, 2021) yakni memastikan sasaran tujuan yang pilih sesuai dengan aktivitas yang akan dilakukan dan dicapai. Tujuan program dapat dikatakan efektif tergantung efektif tidaknya penerapan salah satu unsur pelengkap kebijakan tersebut. Di mana hal ini, dapat ditentukan oleh ketepatan tujuan program dengan cara melihat indikator pelaksanaan program sudah berjalan sesuai rencana dan kepada siapa program tersebut ditunjukkan. Dalam hal ini sasaran kebijakan dari sebuah program adalah pegawai yang bertugas menjalankan atau operator SIPPOL di Sub Bagian Rumah Tangga, karena dari pegawai tersebut, dapat dilihat melalui kinerjanya untuk mengukur keberhasilan sebuah program. Sasaran dari program aplikasi SIPPOL adalah seluruh pegawai operator SIPPOL yang membantu bendahara dalam mencairkan dana. Adanya program aplikasi Sistem Informasi Penatausahaan dan Perbendaharaan Online (SIPPOL) ini digunakan untuk memudahkan para pegawai operator SIPPOL membantu bendahara dalam mengakses dan menginput data secara akurat, valid, efektif, dan efisien. Di mana, sebelumnya bendahara mengalami kesulitan dan memerlukan waktu untuk pelaksanaan pengawasan dan evaluasi pelayanan publik Inspektorat Provinsi Jawa Timur khususnya pada berkas SPJ pegawai bagian Biro Umum Sub. Bagian Rumah Tangga. Maka dari itu, peran dan partisipasi pegawai sangatlah penting karena jika pegawai tidak berpartisipasi secara baik program aplikasi SIPPOL tidak akan tercapai atau berjalan sesuai tujuan.

Sosialisasi program

Menurut Farhani & Adnan, (2021) efektivitas sosialisasi dilihat dari sosialisasi program yang dilaksanakan. Sosialisasi dalam konteks program adalah suatu cara memberikan pemahaman, tata cara, dan pelaksanaan dari sebuah program yang telah dibuat agar dapat diterima secara baik oleh sasaran yaitu pegawai operator SIPPOL untuk menjalankan program dengan baik. Sosialisasi menjadi aspek penting dalam seluruh proses kebijakan meskipun sosialisasi bukanlah serangkaian proses kebijakan publik menurut Jones (1984) dan Winarno (2008). Di mana kebijakan publik hanya terdiri dari tahapan perumusan, implementasi dan evaluasi kebijakan. Berdasar pada anggapan bahwa sosialisasi bukanlah bagian dari urgensi politik, atau jika sosialisasi tidak dilakukan

maka akibatnya politik tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Pada saat sosialisasi merupakan cara yang strategis untuk melaksanakan suatu kebijakan agar dapat mencapai tujuannya. Dalam hal ini, program aplikasi SIPPOL setelah dibentuk dan sebelum diimplementasikan, BPKAD Provinsi Jawa Timur sebagai pemilik program aplikasi SIPPOL melakukan pendampingan kepada pegawai Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur melalui sosialisasi. Sosialisasi dianggap cara yang mudah agar pegawai mampu memahami cara penggunaan atau pelaksanaan program aplikasi tersebut. Namun, sebagian masih terdapat kendala dikarenakan tidak seluruh tata cara diaplikasikan secara jelas dalam sosialisasi yang dilakukan oleh BPKAD, sehingga pegawai operator SIPPOL Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur harus secara mandiri melakukan jemput bola atau mencari informasi dan bertukar ilmu secara mandiri kepada pegawai-pegawai lain yang tugasnya sama.

Tujuan program

Tujuan program atau pencapaian tujuan suatu program memerlukan arahan agar mudah tercapai. Tujuan program juga berperan penting dalam merumuskan atau mendefinisikan program. Dalam Program Aplikasi SIPPOL yang memiliki tujuan meningkatkan kinerja pegawai Sub. Bagian Rumah Tangga dalam membantu bendahara melakukan pengawasan, evaluasi, dan penginputan data laporan pertanggung jawaban atau SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) pegawai Sekretariat Daerah Sub Bagian Rumah Tangga. Meningkatkan Kinerja yang dimaksud adalah para pegawai menjadi lebih mudah dengan waktu yang singkat dalam menyusun laporan untuk menyusun laporan keuangan. Pegawai operator SIPPOL hanya perlu mengunggah dokumen SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) dan SPPD (Surat Pertanggung Jawaban Perjalanan Dinas) telah disetujui oleh bendahara ke dalam aplikasi. Hal ini mengurangi waktu dalam proses penyusunan laporan keuangan, sehingga efisiensi tidak terbatas oleh waktu dan tempat. Meskipun, terdapat faktor penghambat dalam mencapai tujuan program yaitu, kurangnya pegawai operator SIPPOL di Sub. Bagian Rumah Tangga menyebabkan jika berkas SPJ dan SPPD banyak kesulitan dalam proses penginputan, selain itu terdapat beberapa pegawai tidak seberapa paham akan teknologi dan informasi terkini sehingga proses pengerjaan laporan membutuhkan waktu yang lama. Tujuan sasaran yang meningkat dan sesuai tujuan dapat menunjukkan bahwa, hasil mencapai sesuai yang diinginkan, sesuai dengan penjelasan teori pengukuran efektivitas. Hal ini menunjukkan bahwa adanya program aplikasi SIPPOL dalam meningkatkan kinerja pegawai Sub Bagian Rumah Tangga telah mencapai tujuan meskipun terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya.

Pemantauan program

Pemantauan program atau monitoring merupakan kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan suatu keadaan, perilaku, dan kegiatan dengan seksama. Sesuai dengan teori pada penelitian ini, pemantauan program dilaksanakan dengan mengontrol, membandingkan, dan menilai hasil pencapaian program. Apabila dalam pengimplementasian program terjadi kendala untuk mencapai tujuannya, maka dilakukan sebuah evaluasi juga atau memperbaiki kendala tersebut.

Dari hasil wawancara di lapangan, mendapatkan informasi bahwa tidak ada pemantauan program setelah adanya sosialisasi untuk para pegawai operator SIPPOL Sub. Bagian Rumah Tangga Biro Umum. Di mana, sudah dijelaskan pada uraian di atas pada sosialisasi program saja berjalan tetapi, masih kurang karena pegawai operator SIPPOL Sekretariat Provinsi Jawa Timur dituntut untuk aktif jemput bola secara individu dalam mengimplementasikan program aplikasi SIPPOL sesuai tujuan, agar meminimalisir kesalahan yang tidak diinginkan.

D.KESIMPULAN (CONCLUSION)

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian dengan menggunakan indikator teori efektivitas. Empat indikator tersebut menyatakan bahwa program aplikasi Sistem Informasi Penatausahaan dan Perbendaharaan Online (SIPPOL) dalam meningkatkan kinerja Sub. Bagian Rumah Tangga sudah maksimal. Adapun indikatornya yakni: 1) Ketepatan sasaran, yang mana dalam program aplikasi SIPPOL di Sub. Bagian Rumah Tangga dapat dikatakan tepat sasaran yang ditunjukkan dengan pegawai berpartisipasi dengan baik sesuai tugasnya dalam mengimplementasikan program aplikasi SIPPOL tersebut. 2) Sosialisasi Program, BPKAD sebagai pemilik dari program aplikasi SIPPOL ini sudah melakukan sosialisasi dengan baik kepada para pegawai operator SIPPOL Kantor Sekretariat Provinsi Jawa Timur. 3) Pencapaian tujuan program, dalam hal ini program aplikasi SIPPOL Sub. Bagian telah mencapai tujuan yaitu, berhasil dalam meningkatkan kinerja para pegawai di mana pegawai operator SIPPOL menjadi lebih efisien karena mudah dan tidak membutuhkan waktu lama dalam menyusun laporan keuangan. Pegawai operator SIPPOL hanya perlu mengunggah dokumen SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) dan SPPD (Surat Pertanggung Jawaban Perjalanan Dinas) telah disetujui oleh bendahara ke dalam aplikasi. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa hambatan. 4) Pemantauan program, untuk hal ini BPKAD sebagai pemilik program aplikasi SIPPOL masih kurang dalam hal menindaklanjuti atau mengevaluasi program aplikasi SIPPOL pada Kantor Sekretariat Provinsi Jawa Timur.

DAFTAR PUSTAKA (REFERENCES)

- Abdurrahman, J. Sistem Pengelolaan Kinerja Keuangan dan Administrasi di Kantor Pemerintahan.
- Abdussamad, Z. (2021). Metode Penelitian Kualitatif. CV Syakir Media Press.
- Admin Tatalaksana. (2021). Pelatihan Aplikasi Sistem Informasi Penatausahaan Perbendaharaan Online (SIPPOL). Biro Organisasi Jatim.
- Analisis Data Kualitatif (Sira Anak Saleh).
- Andita, A. P., & Yusuf, N. F. (2021). Peran Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Budaya Organisasi. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi (JIIA)*, 11(2), hal 108-118. <http://ejournal.unis.ac.id/index.php/JIIA>
- Basna, N., Bharanti, E., & Waromi, J. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keterlambatan Surat Pertanggungjawaban Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Boven Digoel. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah*, hal 27-50.
- Damanik, M. P., & Purwaningsih, E. H. (2017). E-Government dan Aplikasinya di Lingkungan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Kualitas Informasi Website Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau). *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 21(2), hal 151-164.
- Dewi, P. A. P. L., Animah, & Mariadi, Y. (2021). Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) untuk Pengelolaan Keuangan. *Valid Jurnal Ilmiah*, 19(1), hal 72-86.

- Eprilianto, D. F., Pradana, G. W., & Sari, Y. E. K. (2019). Digital Inovasi Sektor Publik: Efektivitas Kolaborasi Dalam Implementasi Inovasi Desa Digital. *Jurnal El-Riyasah*, 10(2), hal 127–145.
- Gubernur Jawa Timur. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 57 Tahun 2011 Tentang Jabatan Pada Inspektorat Provinsi Jawa Timur. <https://arsipjdih.jatimprov.go.id>
- Herdiana, D. (2018). Sosialisasi Kebijakan Publik: Pengertian dan Konsep Dasar. *Jurnal Ilmiah Wawasan Insan Akademik*, 1(3), hal 13–26.
- Ibrahim, M. M., & Afriansyah, H. *Administrasi Keuangan*.
- Junus, W. A. L., Kalangi, L., & Suwetje, I. G. (2017). Evaluasi Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah Terhadap Pengelolaan Data Keuangan Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 12(2), hal 762–769.
- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BPKAD Provinsi Jawa Timur. (2021). www.bpkad.jatimprov.go.id
- Malik, A. D. (2022). Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah kota Tarakan tahun 2009-2019. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 19(2), hal 482–490.
- Mbipi, S. D., Assih, P., & Sumtaky, M. (2020). Pengelolaan Keuangan Daerah dan Good Governance terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. *AFRE (Accounting and Financial Review)*, 3(2), hal 152–158.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. *Qualitative Data Analysis*. Edisi ketiga. Sage.
- Mulyani, Hardian, D. E., & Kurniawan, I. A. (2021). Implementasi Penggunaan Aplikasi E-Kinerja Penilaian Prestasi Kerja Aparatur Sipil Negara (Asn) Di Dinas Pendidikan Kota Tangerang. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi (JIIA)*, 11(2), hal 95–102. <http://ejournal.unis.ac.id/index.php/JIIA>
- Mulyono, F. (2008). Inovasi di Sektor Publik. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(2), hal 130–144.
- Parawansa, K. I., & Dardak, E. E. Visi Misi & Nawa Bhakti Satya. Diakses 6 Desember 2023, <https://pusatstudijatim.id>
- Purnamawati, D., Suyeno, & Anadza, H. (2022). Efektivitas Program Aplikasi Sistem Informasi Mojokerto Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik (Studi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Mojokerto). *Jurnal Respon Publik*, 16(6), hal 11–18.
- Rizqi, A. W., & Meirinawati. (2023). Inovasi Aplikasi Sistem Informasi Penatausahaan Perbendaharaan Online (Sippol) Dalam Peningkatan Kinerja Pengelolaan Keuangan di Inspektorat Provinsi Jawa Timur. *Publika*, 11(5), hal 2697–2706.
- Saleh, S. (2017). *Analisis Data Kualitatif*. Pustaka Ramadhan.
- Sondang P, S. (2010). *Teori dan praktek kepemimpinan*. Rineka Cipta.
- Sutabri, T. (2012). *Konsep Sistem Informasi*. Andi.
- Tumija, Hendra, A., & Sinurat, M. (2023). Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Media Birokasi*, 5(1), hal 79–91.